

# **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP), PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP *GOOD GOVERNANCE* DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada SKPK di Kota Langsa)**

Ghina Adhha Haura<sup>1</sup>, Afrah Junita<sup>2\*</sup>, Tuti Meutia<sup>3\*</sup>  
<sup>1,2,3</sup> *Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra - Langsa*  
Email: [afrahjunita@unsam.ac.id](mailto:afrahjunita@unsam.ac.id)<sup>2\*</sup>, [tuti\\_meutia@unsam.ac.id](mailto:tuti_meutia@unsam.ac.id)<sup>3\*</sup>

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Good Governance dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) di Kota Langsa. Pemilihan sampel yang diambil dengan menggunakan metode stratified sampling yaitu 8 SKPK yang termasuk kedalam leading sector. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 82 responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis PLS (Partial Least Square). Model persamaan yang dianalisis adalah outer model, inner model dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance (2) Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance (3) Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Good Governance (4) Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance (5) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Good Governance dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi (6) Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Good Governance dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi (7) Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Good Governance dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi.*

*Kata Kunci: Good Governance, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi, SKPK, Langsa*

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the Government Internal Control System, Regional Financial Management and Local Government Apparatus Performance on Good Governance with Organizational Commitment as a Moderation variable. This research was conducted at the City Work Unit (SKPK) in Langsa City. The sample selection is taken using the stratified sampling method, which is 8 SKPK included in the leading sector. Data collection was carried out by distributing questionnaires to 82 respondents. The data obtained were analyzed using PLS (Partial Least Square) analysis technique. The equation model analyzed is the outer model, inner model and hypothesis testing. The results of this study indicate that: (1) Government Internal Control System has a positive and significant effect on Good Governance (2) Regional Financial Management has a positive and significant effect on Good Governance (3) Performance of Local Government Apparatus has no significant effect on Good Governance (4) Organizational Commitment has positive and significant effect on Good Governance (5) Government Internal Control System does not significantly influence Good Governance with Organizational Commitment as a Moderation variable (6) Regional Financial Management does not significantly influence Good Governance with Organizational Commitment as a variable Moderation (7) Performance of Local Government Apparatus does not significantly influence Good Governance with Organizational Commitment as a Moderation variable.*

*Key Words: Government Internal Control System, Regional Financial Management, Local Government Apparatus Performance, Organizational Commitment, City Work Unit, Langsa*

## Pendahuluan

*Good governance* di Indonesia muncul pada era reformasi karena tuntutan terhadap keadaan pemerintah di masa orde baru akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan *control social* (Mukhlis, 2015). Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik atau *good governance* sangat ditentukan oleh keterlibatan dari sinergi tiga aktor utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat (*social society*), dan pihak swasta (Agus, 2011). Semangat reformasi birokrasi memiliki arti sebagai bentuk penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip dari *good governance* secara konsisten (Hindriani dkk., 2012).

Secara umum, terdapat beberapa kendala dalam lingkungan reformasi birokrasi yang tidak mudah diatasi. Hal tersebut disebabkan oleh sistem kekuasaan yang tersentralisir, birokrasi yang tidak efisien, dan adanya kepentingan publik (*public interest*) yang menimbulkan terbentuknya penguasa tertentu sehingga mendorong munculnya praktik korupsi akibat dari lemahnya akuntabilitas publik, kompetensi pengetahuan dan keterampilan para pemangku kepentingan menjadi rendah, serta partisipasi yang tidak cukup kuat (Mukhlis, 2015).

Ruspina (2013) menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* membutuhkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memadai untuk mendukung setiap kegiatan di lingkungan pemerintahan dan harus diterapkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diterapkan oleh pimpinan instansi/lembaga dapat mengontrol proses kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan terhadap laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan serta dapat membantu pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan (Syafriion, 2015).

Perkembangan era reformasi dan otonomi daerah dapat mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah secara signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara efektif dan efisien, ekonomis, transparan, akuntabilitas, sesuai dengan kepatutan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Pemerintah Daerah terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah karena penerapan *good governance* pada pemerintah daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan yang baik (Syafriion, 2015).

Kinerja aparatur pemerintah dapat membantu pimpinan untuk menilai bentuk pencapaian strategi dengan mengukur seberapa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai target yang dianggarkan. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek, sehingga setiap yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai (Agusti, 2012). Pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai *feedback* (umpan balik) yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dan bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya (Fidelius, 2013).

Keberhasilan *good governance* akan menjadi lebih baik dan optimal juga dapat dilihat dari komitmen organisasi. Komitmen menjadi salah satu faktor sangat penting dalam mendukung pelaksanaan *good governance*, karena komitmen yang tinggi mampu menghasilkan kinerja yang kompeten dan tentunya operasi segala kegiatan akan berjalan dengan baik dan terkendali (Damri, 2017). Hadirnya *good governance* saat ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar aparatur pemerintah lebih baik dalam mengelola sistem pemerintahan, sehingga sebuah institusi tidak lepas dari adanya komitmen. Dengan adanya komitmen akan menciptakan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya akan bermuara pada keberhasilan organisasi (Taufik dan Kemala, 2013).

## Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis *Good Governance*

*Good Governance* sering di artikan sebagai “kepemerintahan yang baik”. Ada pula yang mengartikannya sebagai “tata pemerintahan yang baik” atau “sistem pemerintahan yang baik”. Adapun arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian, pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai atas keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, sebagai aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian *good governance* didefinisikan sebagai “penyelenggaraan pemerintah yang kukuh dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjalin kerjasama yang dapat membina antar negara, sektor swasta dan masyarakat” (Tomuka, 2013).

Trisno dkk (2017) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dikemukakan oleh UNDP (*United Nations Development Programs*) (1997) yaitu meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*): Setiap warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan setiap organisasi masyarakat memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik.
3. Aturan Hukum (*Rule of Law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus dilakukan secara adil, diberlakukan tanpa pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh.
4. Transparansi (*Transparency*): Keterbukaan terhadap semua aspek yang menyangkut dengan kepentingan publik sehingga harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
5. Daya Tangkap (*Responsiveness*): Setiap institusi pemerintahan dan proses pelayanannya harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan dalam melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
6. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi setiap kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kelompok masyarakat dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui musyawarah berdasarkan kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
7. Berkeadilan (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik pula terhadap setiap masyarakat dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
8. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and Effeciency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia.
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*): Para pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik, kepekaan untuk mewujudkan kebutuhan, serta adanya pemahaman strategi. Tanpa visi, suatu negara akan ketinggalan akibat setiap daerah yang tidak memiliki visi yang strategis dalam *good governance*.

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut Hanif (2012) mencakup 5 (lima) prosedur yang dirancang serta digunakan untuk memberikan keyakinan memadai dalam memenuhi bentuk dari tujuan pengendalian. yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang berperilaku positif dan kondusif dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan pemerintahan.

2. Penilaian Resiko

Resiko didefinisikan sebagai “kemungkinan kejadian merugikan”. Kategori risiko dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti, penyebab timbulnya resiko, akibat yang ditimbulkan oleh resiko, aktivitas yang dilakukan, dan kejadian yang terjadi, tergantung dari mana kita melihatnya.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur dalam membantu pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko. Dimana tindakan pengendalian ditatalaksanakan melalui kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk melaksanakan fungsi pengendalian yang melekat dalam setiap tatalaksana kegiatan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan organisasi pemerintahan wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan segala informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif dengan cara pimpinan instansi pemerintah sekurang kurangnya harus memanfaatkan berbagai sarana untuk mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Defitri (2018) mengemukakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan sehingga dapat menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat terhadap ketentuan yang berlaku.

Adapun fungsi pengelolaan keuangan daerah melekat pada unsur-unsur dari pelaksanaan tugas yang terdiri dari (1) Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah; (2) Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (3) Adanya tolak ukur kinerja serta standarisasi; (4) Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi; (5) Adanya laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah; dan (6) Terdapat fungsi pengendalian dan pengawasan keuangan daerah.

Anisa Sitompul (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Perencanaan: Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah bahwa memerlukan adanya koordinasi pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan antar daerah.
2. Pelaksanaan: Larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah dengan tujuan yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga kewajiban untuk melaksanakan APBD yang didasarkan pada prinsip hemat, efektif dan efisien.
3. Pelaporan: Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan.
4. Pertanggungjawaban: Bendahara pengeluaran secara administratif wajib membuat pertanggungjawaban atas keseluruhan penggunaan uang terhadap penggunaan anggaran.

### **Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah**

Menurut Agusti (2012) kinerja aparat pemerintahan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu atasan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial, dimana kinerja dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai target yang dianggarkan. Aparatur yang berkualitas adalah aparatur melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik (Janedi, 2015). Ruspina (2013) mengutarakan bahwa untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja organisasi diperlukan beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi, yaitu:

1. Indikator masukan (*input*): Menekankan pada pengukuran atau penilaian kepribadian pegawai dengan hasil atau prestasi kerja yang telah dilaksanakan yang diukur melalui kejujuran, ketaatan, disiplin, loyalitas, inisiatif, kreatifitas, adaptasi, komitmen, motivasi (kemauan), sopan satun dan lain-lain.
2. Indikator proses (*process*): Segala besaran yang menunjukkan upaya harus dilakukan untuk mengolah masukan menjadi keluaran yang menggambarkan perkembangan yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui penilaian prestasi kerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas yang telah diberikan.
3. Indikator keluaran (*output*): Sesuatu yang dapat dicapai dari suatu kegiatan berupa fisik dan nonfisik.
4. Indikator hasil (*outcome*): Sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator manfaat (*benefit*): Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak (*impact*): Menggambarkan pengaruh dan pencapaian program terhadap masyarakat secara luas yang diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

### **Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi merupakan dorongan yang tercipta dari individu untuk melakukan sesuatu dalam meningkatkan keberhasilan organisasi sesuai dengan keinginan yang didasarkan pada tujuan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan individu (Arifin, 2012). Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi cenderung akan menunjukkan kualitas yang baik, lebih totalitas dalam

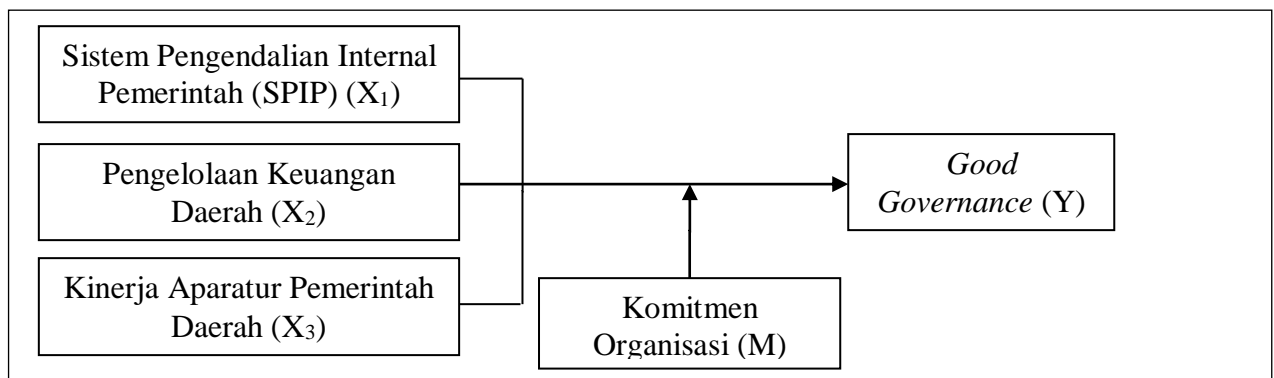
bekerja dan tingkat *turnover* (pergantian) terhadap organisasi pun menjadi rendah (Akbar dkk., 2017).

Arfan dalam Pangestika (2016) mengemukakan bahwa terdapat komponen model dari komitmen organisasional, meliputi:

1. Komitmen Afektif (*Affective Commitment*) merupakan keinginan yang kuat dari diri individu untuk tetap berada dalam organisasi. Komitmen afektif terjadi ketika pegawai ingin menjadi bagian dari anggota organisasi dikarenakan adanya ikatan emosional atau psikologis individu terhadap pegawai.
2. Komitmen Berkelanjutan (*Continuance Commitment*) merupakan kemauan untuk berusaha demi keberhasilan organisasi. Komitmen ini muncul apabila pegawai tetap bertahan dalam organisasi karena alasan tertentu, biasanya hal-hal yang bersifat menguntungkan.
3. Komitmen Normatif (*Normative Commitment*) merupakan kepercayaan yang kuat pegawai terhadap organisasi, termasuk penerimaan nilai, sasaran, dan tujuan organisasi. Komitmen normatif berasal dari nilai-nilai dalam diri pegawai. Pegawai bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena memiliki kesadaran bahwa dia memang berkewajiban untuk melakukannya.

### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), pengelolaan keuangan daerah dan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap *good governance* dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi yaitu :

- H<sub>1</sub>: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap *Good Governance*
- H<sub>2</sub>: Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap *Good Governance*
- H<sub>3</sub>: Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap *Good Governance*
- H<sub>4</sub>: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap *Good Governance*
- H<sub>5</sub>: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap *Good Governance* dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi
- H<sub>6</sub>: Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap *Good Governance* dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi
- H<sub>7</sub>: Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap *Good Governance* dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi

## Metode Penelitian

### Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sebagai variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu *Good Governance* dan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi. Adapun waktu pengujian yang diteliti yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Penelitian ini merupakan studi pada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) di Kota Langsa.

### Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *stratified sampling*. *Stratified sampling* adalah cara penarikan sampel untuk populasi yang memiliki karakteristik heterogen dan juga digunakan oleh populasi yang mempunyai unsur atau anggota berstrata (tingkat) (Sugiyono, 2015:52). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) di Kota Langsa sebanyak 30 SKPK. Berikut daftar seluruh SKPK beserta jumlah pegawai pemerintah di Kota Langsa, yaitu: Sekretariat Daerah Kota Langsa, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pangan, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan

Alasan pemilihan SKPK tersebut dikarenakan SKPK ini memiliki potensial atau keunggulan dalam pembangunan suatu wilayah (daerah) yang dapat berperan sebagai penggerak bagi sektor-sektor lainnya, sehingga dianggap dapat mewakili seluruh SKPK yang ada di Kota Langsa. Sedangkan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pejabat struktural SKPK yaitu Kepala SKPK, Sekretaris, Kepala Bidang serta Kasubag masing-masing SKPK dan selebihnya diberikan kepada staf yang memahami tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berjumlah 82 responden.

### Metode Analisis Data

Data primer yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah *smartPLS (Partial Least Square)* untuk menguji hubungan antar variabel.

Adapun penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap *Good Governance* dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_1.M + b_5X_2.M + b_6X_3.M + e$$

Dimana:

Y	= <i>Good Governance</i>
a	= Konstanta
$b_{1,2,3,4,5,6}$	= Koefisien Regresi
$X_1$	= Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
$X_2$	= Pengelolaan Keuangan Daerah
$X_3$	= Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
M	= Komitmen Organisasi
e	= Variabel Pengganggu ( <i>error term</i> )

**Hasil dan Pembahasan**

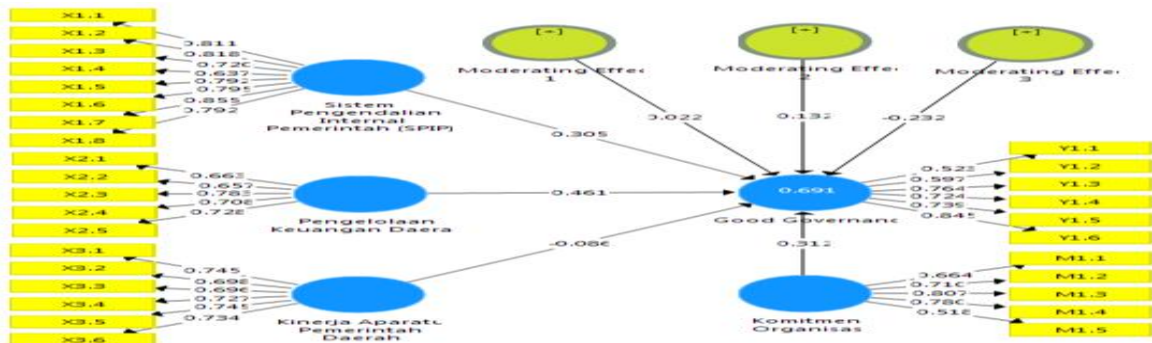
Pada penelitian ini, model analisis jalur variabel laten dalam PLS (*Parsial Least Square*) terdiri dari 3 set hubungan: (1) *Inner model* yang menspesifikasikan hubungan antar variabel laten (*Structural model*) untuk menilai apakah mempunyai pengaruh yang *substantive*, (2) *Outer model* digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dalam menspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya (*Measurement model*), dan (3) *Weight relation* dimana dalam menilai kasus dari variabel laten dapat diestimasi dengan mengasumsikan bahwa variabel laten dan indikator atau manifest variabel berada diskala *zero means* dan unit *variance* (nilai *standardized*) sehingga parameter lokasi (parameter konstanta) dapat dihilangkan dalam model (Ghozali, 2015).

**Pengujian Outer Model**

Terdapat 4 (empat) kriteria dalam menganalisis data dengan menggunakan PLS untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*. Indikator dalam penelitian ini adalah indikator reflektif yang dinilai berdasarkan korelasi antar *item score*, sehingga cara pengukuran berdasarkan kriteria tersebut sebagai berikut:

**Convergent Validity**

*Convergent validity* dapat mengukur besarnya korelasi antara konstruk dengan variabel laten. Dalam evaluasi *convergent validity*, dapat juga dilihat dari *standardized loading factor*. *Standardize loading factor* menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan variabel. Kolerasi dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai  $\geq 0,5$ . Berikut skema model penelitian awal dengan variabel dan indikator lengkap:



**Gambar 2 Model Penelitian Awal**

Adapun hasil pengujian awal model penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Pengujian Awal**

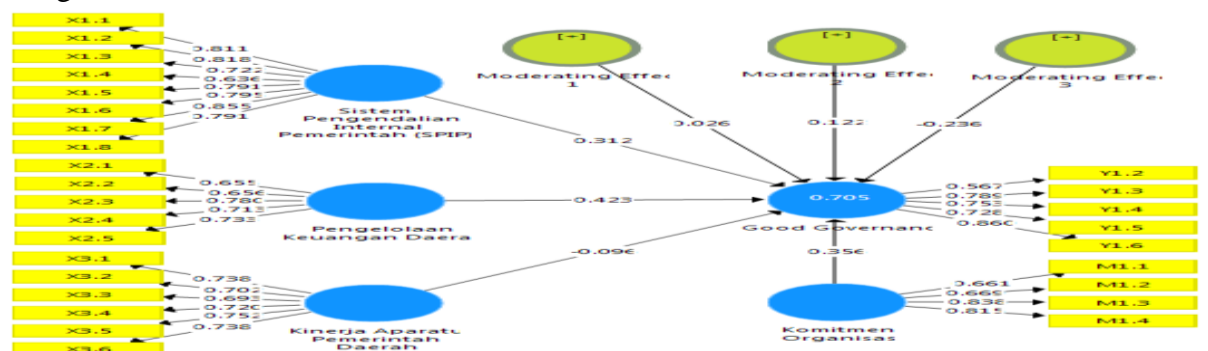
Indikator	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	M	Y	Keterangan
X <sub>1.1</sub>	0,811					Valid
X <sub>1.2</sub>	0,818					Valid
X <sub>1.3</sub>	0,720					Valid
X <sub>1.4</sub>	0,637					Valid
X <sub>1.5</sub>	0,792					Valid
X <sub>1.6</sub>	0,795					Valid
X <sub>1.7</sub>	0,855					Valid
X <sub>1.8</sub>	0,792					Valid
X <sub>2.1</sub>		0,663				Valid

X <sub>2.2</sub>		0,657				Valid
X <sub>2.3</sub>		0,783				Valid
X <sub>2.4</sub>		0,708				Valid
X <sub>2.5</sub>		0,728				Valid
X <sub>3.1</sub>			0,745			Valid
X <sub>3.2</sub>			0,698			Valid
X <sub>3.3</sub>			0,696			Valid
X <sub>3.4</sub>			0,727			Valid
X <sub>3.5</sub>			0,745			Valid
X <sub>3.6</sub>			0,734			Valid
M <sub>1.1</sub>				0,664		Valid
M <sub>1.2</sub>				0,710		Valid
M <sub>1.3</sub>				0,807		Valid
M <sub>1.4</sub>				0,780		Valid
M <sub>1.5</sub>				0,518		Valid
Y <sub>1.1</sub>					0,523	Valid
Y <sub>1.2</sub>					0,597	Valid
Y <sub>1.3</sub>					0,764	Valid
Y <sub>1.4</sub>					0,724	Valid
Y <sub>1.5</sub>					0,735	Valid
Y <sub>1.6</sub>					0,845	Valid

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 3, melalui pengukuran (*outer loading*) menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai *outer loading*  $\geq 0,5$ . Namun, masih terdapat beberapa indikator pada variabel yang memiliki “angka merah” artinya indikator tersebut memerlukan perhatian dibandingkan dengan indikator yang lain. Meskipun menurut Ghozali (2015), nilai *outer loading* antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat *convergent validity*.

Berdasarkan kriteria penilaian PLS (*Parsial Least Square*), jika terdapat indikator yang tidak memenuhi kriteria (*rule of thumbs*) harus dikeluarkan dari model karena dianggap tidak mampu mengukur variabel asosiasinya serta dapat menaikkan nilai pengukuran model (*outer loading*) pada masing-masing item dan juga nilai dari *convergent validity*. Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) indikator yang tidak memenuhi kriteria yaitu Y<sub>1.1</sub> dan M<sub>1.5</sub>, sehingga harus dilakukan penghapusan indikator dan dilanjutkan dengan melakukan estimasi ulang atau re-estimasi. Berikut ini gambar hasil model penelitian yang telah diestimasi ulang, sebagai berikut:



Gambar 3 Model Penelitian Akhir

Adapun hasil pengujian akhir model penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Pengujian Akhir**

Indikator	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	M	Y	Keterangan
X <sub>1.1</sub>	0,811					Valid
X <sub>1.2</sub>	0,818					Valid
X <sub>1.3</sub>	0,720					Valid
X <sub>1.4</sub>	0,637					Valid
X <sub>1.5</sub>	0,792					Valid
X <sub>1.6</sub>	0,795					Valid
X <sub>1.7</sub>	0,855					Valid
X <sub>1.8</sub>	0,792					Valid
X <sub>2.1</sub>		0,663				Valid
X <sub>2.2</sub>		0,657				Valid
X <sub>2.3</sub>		0,783				Valid
X <sub>2.4</sub>		0,708				Valid
X <sub>2.5</sub>		0,728				Valid
X <sub>3.1</sub>			0,745			Valid
X <sub>3.2</sub>			0,698			Valid
X <sub>3.3</sub>			0,696			Valid
X <sub>3.4</sub>			0,727			Valid
X <sub>3.5</sub>			0,745			Valid
X <sub>3.6</sub>			0,734			Valid
M <sub>1.1</sub>				0,664		Valid
M <sub>1.2</sub>				0,710		Valid
M <sub>1.3</sub>				0,807		Valid
M <sub>1.4</sub>				0,780		Valid
Y <sub>1.2</sub>					0,597	Valid
Y <sub>1.3</sub>					0,764	Valid
Y <sub>1.4</sub>					0,724	Valid
Y <sub>1.5</sub>					0,735	Valid
Y <sub>1.6</sub>					0,845	Valid

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa hasil re-estimasi menunjukkan kenaikan nilai *loading factor* dari masing-masing indikator yang dapat mengukur variabel. Sehingga seluruh indikator telah memiliki validitas baik karena memiliki nilai *loading factor* ≥ 0,5.

Dari nilai *outer loading* yang terdapat dalam tabel 4, dapat dibuat persamaan spesifikasi untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

$$SPIP = 0,811 X_{1.1} + 0,818 X_{1.2} + 0,720 X_{1.3} + 0,637 X_{1.4} + 0,792 X_{1.5} + 0,795 X_{1.6} + 0,855 X_{1.7} + 0,792 X_{1.8} \dots \dots \dots (1)$$

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa indikator X<sub>1.2</sub> memiliki nilai paling tinggi yaitu 0,855, artinya indikator tersebut berpengaruh paling besar terhadap variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

$$PKD = 0,663 X_{2.1} + 0,657 X_{2.2} + 0,783 X_{2.3} + 0,708 X_{2.4} + 0,728 X_{2.5} \dots \dots \dots (2)$$

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa indikator X<sub>2.4</sub> memiliki nilai paling tinggi yaitu 0,783, artinya indikator tersebut berpengaruh paling besar terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Daerah.

$$KAPD = 0,745 X_{3.1} + 0,698 X_{3.2} + 0,696 X_{3.3} + 0,727 X_{3.4} + 0,745 X_{3.5} + 0,828 X_{3.6} \dots \dots \dots (3)$$

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa indikator X<sub>3.3</sub> memiliki nilai paling tinggi yaitu 0,828, artinya indikator tersebut berpengaruh paling besar terhadap variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

$$KO = 0,664 M_{1.1} + 0,710 M_{1.2} + 0,807 M_{1.3} + 0,780 M_{1.4} + 0,518 M_{1.5} \dots \dots \dots (5)$$

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa indikator  $M_1$  memiliki nilai paling tinggi yaitu 0,807, artinya indikator tersebut berpengaruh paling besar terhadap variabel Komitmen Organisasi.

$$GG = 0,523 Y_{1.1} + 0,597 Y_{1.2} + 0,764 Y_{1.3} + 0,724 Y_{1.4} + 0,735 Y_{1.5} + 0,845 Y_{1.6} \dots\dots\dots (4)$$

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa indikator  $Y_3$  memiliki nilai paling tinggi yaitu 0,845, artinya indikator tersebut berpengaruh paling besar terhadap variabel *Good Governance*.

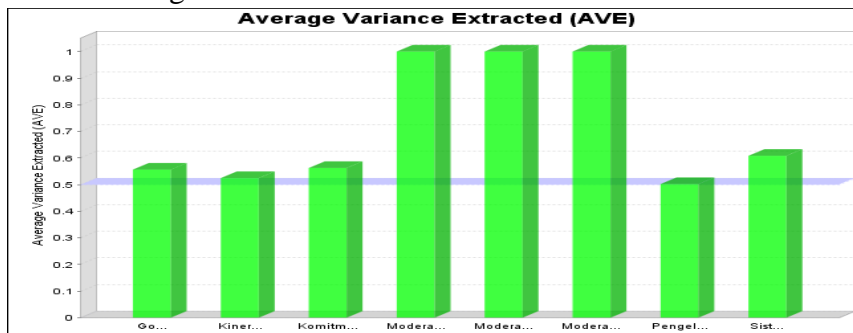
*Discriminant validity* dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai *Average Variant Extracted (AVE)* untuk masing-masing variabel dengan syarat nilainya harus  $\geq 0,5$  untuk memenuhi kriteria validitas konvergen (Ghozali, 2015). Adapun nilai *Average Variant Extracted (AVE)* untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Average Variant Extracted (AVE)**

Variabel Penelitian	AVE
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ( $X_1$ )	0,608
Pengelolaan Keuangan Daerah ( $X_2$ )	0,502
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah ( $X_3$ )	0,525
<i>Good Governance (Y)</i>	0,556
Komitmen Organisasi (M)	0,563
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) -> <i>Good Governance</i> * Komitmen Organisasi	1,000
Pengelolaan Keuangan Daerah -> <i>Good Governance</i> *Komitmen Organisasi	1,000
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah -> <i>Good Governance</i> *Komitmen Organisasi	1,000

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Adapun histogram yang menunjukkan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* pada penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 4 Histogram Nilai AVE**

Berdasarkan gambar 4, diketahui nilai AVE dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance*, Komitmen Organisasi dan variabel *Moderating Effect* menunjukkan nilai  $AVE \geq 0,5$ . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

**Composite Reliability**

*Composite Reliability* merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas terhadap indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan

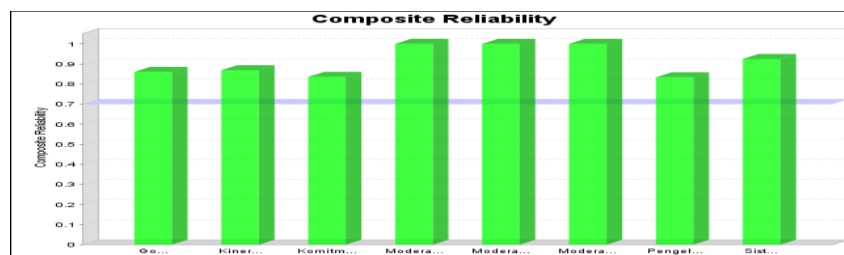
memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability*  $\geq 0,6$  (Ghozali, 2015). Berikut ini adalah nilai *composite reliability* dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 6**  
**Composite Reliability**

Variabel Penelitian	Composite Reliability	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X <sub>1</sub> )	0,925	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah (X <sub>2</sub> )	0,834	Reliabel
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (X <sub>3</sub> )	0,869	Reliabel
Good Governance (Y)	0,860	Reliabel
Komitmen Organisasi (M)	0,836	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) -> Good Governance * Komitmen Organisasi	1,000	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah -> Good Governance *Komitmen Organisasi	1,000	Reliabel
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah -> Good Governance *Komitmen Organisasi	1,000	Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Adapun histogram yang menunjukkan nilai *Composite Reliability* peneliti ini sebagai berikut:



**Gambar 5 Histogram Nilai Composite Reliability**

Berdasarkan data pada tabel 6 dan gambar 5, diketahui bahwa nilai *composite reliability* semua variabel penelitian ialah  $\geq 0,6$ . Hasil ini menunjukkan masing-masing variabel telah memenuhi nilai *composite reliability* atau tingkat reliabilitas yang baik.

### Cronbach's Alpha

Uji realibilitas dengan *composite reability* di atas dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *cronbach alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach alpha* apabila memiliki nilai *cronbach alpha*  $\geq 0,6$ . Berikut ini adalah nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel:

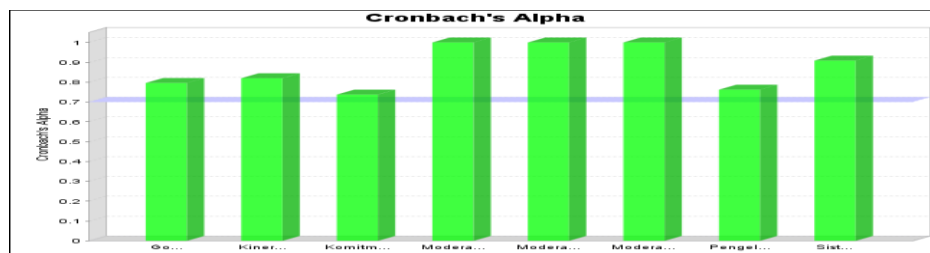
**Tabel 7**  
**Cronbach's Alpha**

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X <sub>1</sub> )	0,909
Pengelolaan Keuangan Daerah (X <sub>2</sub> )	0,762
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (X <sub>3</sub> )	0,820
Good Governance (Y)	0,796
Komitmen Organisasi (M)	0,738
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) -> Good Governance * Komitmen Organisasi	1,000

Pengelolaan Keuangan Daerah -> <i>Good Governance</i> *Komitmen Organisasi	1,000
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah -> <i>Good Governance</i> *Komitmen Organisasi	1,000

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Adapun histogram yang menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 6 Histogram Nilai Cronbach's Alpha**

Berdasarkan tabel 8 dan gambar 6, dapat diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel penelitian  $\geq 0,6$ . Dengan demikian hasil ini dapat menunjukkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

**Pengujian Inner Model**

*Inner model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Adapun teknik pengujian *inner model* sebagai berikut:

**R<sup>2</sup> (R-Square)**

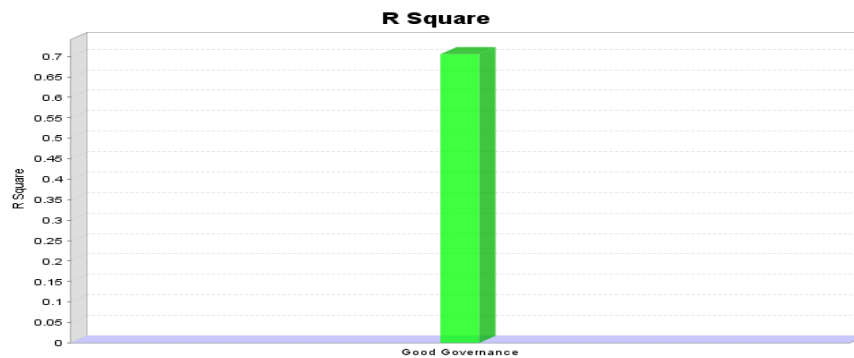
Model struktural (*inner model*) dievaluasi dengan melihat persentase yang dijelaskan oleh nilai *R<sup>2</sup> (R-Square)* untuk variabel dependen. *R<sup>2</sup>* digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengetahui besarnya variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen.

Hasil *R<sup>2</sup>* sebesar  $> 0,67$  untuk variabel dependen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh variabel independen (yang mempengaruhi) terhadap variabel dependen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar  $0,33 - 0,67$  maka termasuk dalam kategori sedang, dan jika hasilnya sebesar  $0,19 - 0,33$  maka termasuk dalam kategori lemah (Ghozali, 2015). Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai *R<sup>2</sup>* sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Nilai R-Square**

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
<i>Good Governance</i> (Y)	0,705	0,674

Adapun histogram yang menunjukkan nilai *R-Square* pada penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 7 Histogram Nilai R-Square**

Berdasarkan data pada tabel 9 dan gambar 7, menunjukkan nilai  $R^2$  untuk variabel *good governance* adalah 0,705. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa besarnya persentase *good governance* yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen adalah sebesar 70%, sedangkan sisanya sebesar 30% untuk menjelaskan variabel di luar model penelitian ini.

**$f^2$  (f-Square)**

Adapun untuk menguji pengaruh hubungan antar variabel dapat dilihat dari tabel  $f^2$  (f-Square). Perubahan nilai  $R^2$  dapat digunakan untuk melihat apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen memiliki pengaruh substantif yang diukur melalui *Effect Size*  $f^2$ . Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka hasil  $f^2$  yang diperoleh sebagai berikut:

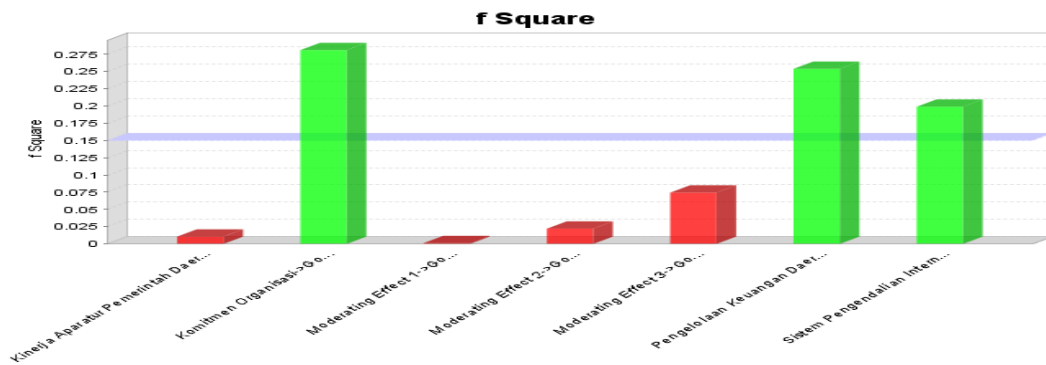
**Tabel 10  
Nilai f-Square**

Pengaruh antar variable	$f^2$	Pengaruh
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X1) -> <i>Good Governance</i> (Y)	0,199	Medium
Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) -> <i>Good Governance</i> (Y)	0,254	Besar
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (X3) -> <i>Good Governance</i> (Y)	0,011	Lemah
Komitmen Organisasi (M) -> <i>Good Governance</i> (Y)	0,281	Besar
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) -> <i>Good governance</i> * Komitmen Organisasi	0,001	Lemah
Pengelolaan Keuangan Daerah -> <i>Good governance</i> *Komitmen Organisasi	0,022	Lemah
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah -> <i>Good governance</i> *Komitmen Organisasi	0,074	Lemah

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Nilai *F-Square* sebesar 0,02, 0,15 dan 0,35 dapat diinterpretasikan apakah prediktor variabel laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium atau besar pada tingkat struktural.

Adapun histogram yang menunjukkan nilai *f-Square* penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 8 Histogram Nilai f-Square

**Pengujian Hipotesis**

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat perbandingan nilai *T-table* dan *T-statistics*. Jika *T-statistics* lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *T-table*, berarti hipotesis penelitian diterima. Hipotesis penelitian diterima jika angka absolute nilai *T-statistics* > 1,96 (Tingkat presisi 5%) dengan tanda koefisien sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan (positif atau negatif). Uji *T-statistics* dimaksudkan untuk menguji apakah variabel indenpenden secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh:

**Tabel 11**  
Nilai *T-statistics*

Pengaruh antar variable	<i>T-statistics</i>	Signifikansi
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ( $X_1$ ) -> Good Governance (Y)	3,784	Diterima
Pengelolaan Keuangan Daerah ( $X_2$ ) -> Good Governance (Y)	3,506	Diterima
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah ( $X_3$ ) -> Good Governance (Y)	0,685	Ditolak
Komitmen Organisasi (M) -> Good Governance (Y)	4,736	Diterima
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) -> Good governance * Komitmen Organisasi	0,273	Ditolak
Pengelolaan Keuangan Daerah -> Good governance *Komitmen Organisasi	0,948	Ditolak
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah -> Good governance * Komitmen Organisasi	1,668	Ditolak

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Good Governance**

Nilai probabilitas dari penelitian ini apabila nilai prob > 0,05 atau *T-statistics* > *T-table*. Tabel 10 menjelaskan hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pegendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance yang menyatakan nilai *T-Statistics* > *T-table* (1,96) yaitu sebesar 3,784.

Pengujian ini didukung oleh penelitian Mahesthi (2017) bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah terhadap good governance, dimana ketika ada peningkatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka akan meningkatkan good governance pada SKPD tersebut.

### **Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap *Good Governance***

Nilai probabilitas dari penelitian ini apabila nilai  $prob > 0,05$  atau  $T\text{-statistics} > T\text{-table}$ . Tabel 10 menjelaskan hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini menunjukkan variabel Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Good Governnace* yang menyatakan nilai  $T\text{-Statistics} > T\text{-table}$  (1,96) yaitu sebesar 3,506.

Pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2018) bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang sesuai prinsip-prinsip *good governance*.

### **Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap *Good Governance***

Nilai probabilitas dari penelitian ini apabila nilai  $prob > 0,05$  atau  $T\text{-statistics} > T\text{-table}$ . Tabel 10 menjelaskan hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Good Governnace* yang menyatakan nilai  $T\text{-statistics} < T\text{-table}$  (1,96) yaitu sebesar 0,685. Hal ini sejalan dengan konsisten permasalahan yang terjadi pada kinerja aparatur pemerintah di kota Langsa. Berdasarkan LAKIP (2017:45) menjelaskan bahwa persentase pegawai yang memiliki kinerja dan disiplin yang baik menunjukkan adanya penurunan, dimana pada tahun 2016 mencapai 99,75% sedangkan pada tahun 2017 menjadi 99,71%. Salah satu penyebab rendahnya kualitas pegawai adalah pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh pegawai dan kurang adanya kesadaran pegawai dalam melaksanakan aturan disiplin pegawai (LAKIP, 2017:46).

Pengujian hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Ruspina (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kinerja aparatur pemerintah pemerintah dengan *good governance*. Dimana dengan menerapkan *good governance*, akan menghasilkan karakteristik pemerintahan yang baik dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *good governance*.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap *Good Governance***

Nilai probabilitas dari penelitian ini apabila nilai  $prob > 0,05$  atau  $T\text{-statistics} > T\text{-table}$ . Tabel 10 menjelaskan hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Good Governnace* yang menyatakan nilai  $T\text{-Statistics} > T\text{-table}$  (1,96) yaitu sebesar 4,736.

Pengujian penelitian ini sejalan dengan peneltian yang dilakukan Jalius (2017) bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan *good governance*, karena dalam menjalankan komitmen organisasi, pegawai harus memiliki keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai organisasi. Dalam hal ini sasaran yang ingin dicapai adalah sasaran terhadap pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good government governance*.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap *Good Governance* dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi**

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Good Governance* dengan Komitmen Organisasi sebagai pemoderasi yang menyatakan nilai  $T\text{-statistics} < T\text{-table}$  (1,96) yaitu sebesar 0,273. Hipotesis ini menerangkan

bahwa variabel komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap *good governance*.

Penerapan pengendalian pada instansi pemerintah dapat berbeda dengan instansi pemerintah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan (1) visi, misi dan tujuan (2) lingkungan dan cara beroperasi (3) tingkat kerumitan organisasi (4) sejarah atau latar belakang serta budaya dan (5) risiko yang dihadapi. Berbagai permasalahan serta tantangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan harus hadapi untuk mengoptimalkan peran dari pengendalian internal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* (Damayanthi, 2015).

### **Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap *Good Governance* dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance* dengan Komitmen Organisasi sebagai pemoderasi yang menyatakan nilai *T-statistics* < *T-table* (1,96) yaitu sebesar 0,948. Artinya komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh pengelolaan Keuangan daerah terhadap *good governance*.

Sagita., dkk (2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa pihak yang mengandalkan nilai informasi keuangan sebagai dasar upaya dalam pengambilan keputusan. Jika nilai informasi laporan keuangan buruk, artinya laporan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang kurang baik sehingga didalam laporan mengandung kesalahan seperti tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan dan tidak andal dalam penyampaianya maka akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan penyajian laporan itu sendiri.

### **Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap *Good Governance* dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kinerja Aparatur Pemeirntah Daerah ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance* (Y) dengan Komitmen Organisasi sebagai pemoderasi yang menyatakan nilai *T-statistics* < *T-table* (1,96) yaitu sebesar 1,668. Hipotesis ini menerangkan bahwa komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan *good governance*.

Menurut Siwambudi., dkk (2017), bentuk penurunan interaksi komitmen organisasi diantara pegawai dikarenakan kurangnya penghargaan (*reward*) bagi pegawai yang berprestasi, promosi jabatan tidak sesuai dengan ketentuan, penghasilan yang diterima tidak sesuai beban kerja, dan lingkungan kerja yang tidak kondusif untuk menunjang pegawai dalam bekerja sehingga kemampuan yang dimiliki pegawai tidak digunakan secara maksimal.

### **Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan: (a) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh secara signifikan terhadap *Good Governance*, (b) Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance*, (c) Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance*, (d) Komitmen Organsasi berpengaruh secara signifikan terhadap *Good Governance*, (e) Komitmen Organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap *Good Governance*, (f) Komitmen Organisasi tidak mampu memoderasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap *Good Governance*, (g) Komitmen Organisasi tidak mampu memoderasi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap *Good Governance*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan yaitu: (a) Pemerintah Kota Langsa harus meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dalam mengkaji ulang segala bentuk kegiatan pemerintahan secara keseluruhan, karena hal tersebut akan membantu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), (b) Pemerintah Kota Langsa dapat meningkatkan lagi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga hasil *output* yang diperoleh akan berdampak pada kualitas informasi khususnya dalam mengelola keuangan daerah, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memenuhi prinsip-prinsip dari *good governance*, (c) Pemerintah Kota Langsa seharusnya membentuk kinerja aparatur melalui upaya pendidikan, pelatihan pegawai dan pemberian intensif yang sesuai, kemudian mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas kepada mereka dengan memberikan *reward and punishment* berdasarkan pencapaian kinerja pegawai sehingga prinsip-prinsip *good governance* dapat dipenuhi dan terlaksana. (d) Pemerintah Kota Langsa dapat meningkatkan komitmen organisasi di setiap lingkungan pemerintahan, karena saat ini masih terdapat pegawai yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya kedisiplinan dan tanggungjawab. (e) Pemerintah Kota Langsa dalam menerapkan *good governance* membutuhkan pelaksana yang relevan agar seluruh aktivitas dan kegiatan pemerintahan dapat berjalan secara maksimal, hal ini berkaitan dengan peran pengendalian internal dalam memperbaiki sistem pengendalian. Salah satunya dengan melakukan evaluasi terus menerus agar dapat memperbaharui sistem dengan baik. (f) Pemerintah Kota Langsa memiliki tanggungjawab dalam mengelola keuangan daerah, sehingga pihak yang berwenang harus bersikap bijaksana dan akurat dalam memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab, dan (g) Pegawai Pemerintah Kota Langsa seharusnya dapat bekerja sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, karena hal tersebut mampu menciptakan iklim pekerjaan yang lebih optimal dalam memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat. Dengan adanya komitmen yang tinggi, maka akan menunjang pegawai untuk menjalankan tugas yang dibebankannya dengan maksimal.

## REFERENSI

- Agus, Yus Amri. 2011. Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik. **Tesis**. Universitas Lampung.
- Agusti, Restu. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Dimoderasi oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Organisasi. **Jurnal Ekonomi**. 20 (3).
- Akbar, Amirul dkk. 2017. Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kinerja. **Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)**. 47 (2).
- Anisa Sitompul, Putri Baday. 2014. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. **Artikel Ejournal**.
- Arifin, Solikhun. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi. **Skripsi**. Universitas Diponegoro.
- Aziz, Nur Jannah Abdi, dkk. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah. **Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)**. Vol.20, No.4.

- Claraini, Chici. 2017. Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. **JOM Fakultas Ekonomi**. 4 (1).
- Defitri, Siska Yulia. 2018. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. **Jurnal Benefita**. 3 (1): 64-75.
- Fidelius. 2013. Analisis Rasio untuk mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. **Jurnal EMBA**. 4 (1).
- Ghozali, Imam. 2015. **Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Aplikasi SmartPLS 3.0**. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanif. 2012. Urgensi Sistem Pengendalian Intern Bagi Instansi Pemerintah. **ASAS**. 4 (2).
- Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Kualitas Laporan Keuangan. **STAR-Study Accounting Research**. 11 (1).
- Hindriani, Nuning dkk. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah. **Wacana**. 15 (3).
- Jalius, M. Fajri. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern*, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan *Good Government Governance*. **JOM Fekon**. 4 (2).
- Jenedi, Antonio. 2015. Studi Tentang Kinerja Aparatur Pemerintah Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat. **eJournal Administrasi Negara**. 3 (3): 700-713.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2018
- Mahesthi, Maruti Giri. 2017. Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Penerapan *Good Governance* dan Dampaknya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan**. 13 (2).
- Mukhlis, Ahmad. 2015. Implementasi Prinsip *Good Governance* di Pemerintahan Desa. **Skripsi**. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pangestika, Fierda. 2016. Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Governance*, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. **Skripsi**. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP).
- Purnami, Rahayu S. 2013. Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasional Terhadap Kewarganegaraan Organisasional Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi Politeknik Komputer Niaga Lpkia Bandung. **Skripsi**. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ruspina, Depi Oktia. 2013. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan *Good Governance*. **Skripsi**. Universitas Negeri Padang.
- Sagita, Amelia Dara, dkk. 2018. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. **Jurnal Magister Manajemen**. 2 (1).
- Sari, Finda Dwita, dkk. 2017. Determinan Implementasi *Good Governance* serta Implikasinya pada Akuntabilitas Keuangan Daerah. **Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi**.

- Sari, Weni Nirmala. 2017. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Komitmen Organisasi terhadap *Good Governance*. **JOM Fakultas Ekonomi**. 4 (1).
- Siwambudi, I Gusti Ngurah, dkk. 2017. Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian *Intern* Pada Kualitas Laporan Keuangan. **E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana**. 6 (1).
- Sugiyono. 2015. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.
- Syafrion, Fanda Yovano. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan *Good Governance*. **JOM Fakultas Ekonomi**. 2(2).
- Taufik, Taufeni dan Dian Kemala. 2013. Pengaruh Pemahaman Prinsip-prinsip *Good Governance*, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik. **Pekbis Jurnal**. 5 (1).
- Tomuka, Shinta. 2013. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung. **Jurnal Eksekutif**. 2 (1).
- Trisno, Andhika dkk. 2017. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado. **Jurnal Eksekutif**. 1 (1).
- Wiratno, Adi, dkk. 2013. Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern terhadap Penerapan *Good Governance* serta Implikasinya pada Kinerja. **Jurnal Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**. Universitas Jenderal Soedirman.